

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan guna memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperluas basis data perpajakan dengan mengintegrasikan sistem administrasi kependudukan dan perpajakan secara lebih efektif. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai kewajiban perpajakan, seperti pelaporan SPT dan pembayaran pajak, dengan hanya menggunakan satu identitas. Pemadanan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan akurasi data wajib pajak, serta memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini menghambat kepatuhan wajib pajak, seperti duplikasi data, kesalahan dalam pelaporan, dan rendahnya kesadaran wajib pajak.

Implementasi kebijakan ini memiliki implikasi yang luas, terutama bagi karyawan yang merupakan subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, dan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak ini sangat penting untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan pajak merupakan tindakan atau perilaku wajib pajak yang mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Teori kepatuhan pajak menyediakan berbagai perspektif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak.

Penelitian terdahulu menggarisbawahi pentingnya faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan interaksi dalam menentukan kepatuhan pajak. Pemahaman tentang teori dan hasil penelitian ini membantu dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan strategis.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah salah satu lembaga yang mempekerjakan banyak karyawan, dan penerapan kebijakan pemadanan NIK sebagai NPWP di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Besuki Raya menjadi kasus yang menarik untuk diteliti dan terdapat kekhawatiran mengenai kualitas dan konsistensi data antara sistem NIK dan NPWP. Ketidacocokan data atau kesalahan dalam pemadanan dapat menyebabkan masalah administrasi, seperti kesalahan dalam perhitungan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan. Wilayah Besuki Raya, yang meliputi beberapa kabupaten di Jawa Timur, memberikan konteks spesifik yang dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor tertentu.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pemadanan NIK sebagai NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Besuki Raya. Beberapa aspek yang akan dianalisis meliputi tingkat pelaporan tepat waktu, akurasi data wajib pajak, dan persepsi karyawan serta manajemen terhadap kebijakan ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang perpajakan, khususnya dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kebijakan yang lebih sederhana dan efisien. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa depan.

Dari penjelasan di atas peneliti mengambil judul penelitian mengenai “Pengaruh Pemadanan NIK sebagai NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PPh Orang Pribadi Pasal 21 Karyawan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Se-Besuki Raya)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini adalah apakah pemadanan NIK sebagai NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh pemadanan NIK sebagai NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis, memberikan sumbangan penelitian dan memperluas wawasan bagi kajian dalam sektor perpajakan sebagai penerapan teori-teori yang didapatkan oleh peneliti selama perkuliahan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Aspek Praktis, memberikan sumbangan kepada wajib pajak ataupun perusahaan mengenai pemahaman tentang sektor perpajakan yang memberikan dampak pada peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak.